

Skripsi

**INOVASI MOTORISASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
NELAYAN DI KECAMATAN KALUKUANG MASALIMA KABUPATEN
PANGKEP**

Junaid

Nomor Stambuk : 105640 1334 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**INOVASI MOTORISASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
NELAYAN DI KECAMATAN LIUKAN KALMAS DI KABUPATEN
PANGKEP**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjan Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan

Junaid

Nomor Stambuk : 105640133411

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : INOVASI MOTORISASI DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN NELAYAN KECAMATAN LIUKANG
KALMAS DI KABUPATEN PANGKEPKEP

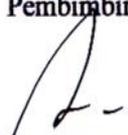
Nama Mahasiswa : JUNAID

Nomor Stambuk : 105640133411

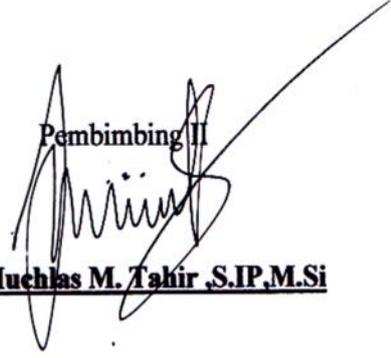
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

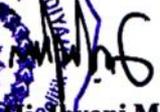

Drs.H.Ansyari Mone,M.pd

Pembimbing II

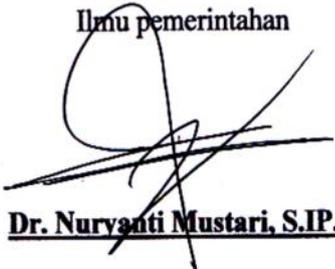

Muchlas M. Tahir ,S.IP,M.Si

Menyetujui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hjs Ihyani Malik, S.Sos,M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu pemerintahan

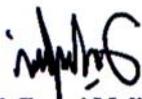

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0068/FSP/A. 1-VIII/1/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018.

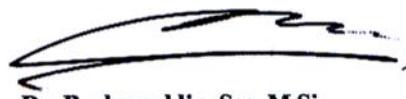
TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos, M.Si

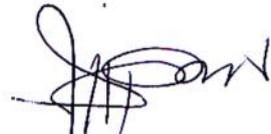
Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, Sos, M.Si

Penguji :

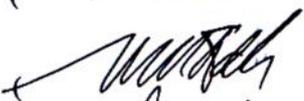
1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (ketua)

()

2. Abd Kadir Adys, SH, MM

()

3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd

()

4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Junaid

Nomor Stambuk : 105640 1334 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Yang Menyatakan,



Junaid

ABSTRAK

Junaid, Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, (dibimbing oleh. Ansyari Mone. dan Muchlas M Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan indikator prose inovasi motorisasi dan selanjutnya diuraikan faktor pendukung dan penghambat inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapal dengan mesin motor penting untuk dimanfaatkan nelayan yang secara khusus digunakan untuk mencari ikan torani atau ikan terbang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, selanjutnya ide yang digagas untuk melakukan motorisasi perahu nelayan guna meningkatkan pendapatan nelayan tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga perikanan yang ada di SetiapDesa, Selain itu kapal yang dilengkapi dengan motor penggerak dapat menempuh jarak operasi yang lebih jauh yang tentunya menghasilkan jumlah tangkapan yang berbeda dengan perahu tanpa motor sehingga ditemukan perbedaan pendapatan yang cukup signifikan, oleh karena itu melalui inovasi motorisasi pendapatan nelayan jauh lebih meningkat tidak hanya terbatas untuk kebutuhan keluarga nelayan tetapi dapat memberikan tambahan pada pendapatan. Kemudian factor pendukung yaitu bantuan pemerintah berupa sarana bagi nelayan yang miskin dan kurang mampu dalam bentuk mesin atau motor kapal. Selain itu semakin banyaknya penggunaan kapal jolloro dan kapal berukuran besar yang membutuhkan mesin motor mendorong perlunya inovasi motorisasi. Sementara factor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kondisi alam yang tidak mendukung dan biaya perbaikan dan operasional kapal yang mengakibatkan pendapatan nelayan terpengkas.

Kata Kunci : Inovasi, Motorisasi, Nelayan

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi WaBarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala anugerah, rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan keselamatan, keridhoan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“INOVASI MOTORISASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN KALUKUANG MASALIMA KABUPATEN PANGKEP.”*** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, dan Kerangka Pikir, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan yang berharga ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan atas segala apresiasi yang telah disumbangkan serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H.Ansyari Mone, M.Pd sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan saran-saran kepada penulis semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda.
2. Muchlas M, Tahir, S.IP,M.Si. sebagai pembimbing II yang dengan tulus memberikan motivasi, semangat, bimbingan, petunjuk arahan, dan saran-saran selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar sampai pada penyusunan skripsi ini.
3. Bapak. Drs. H. Abdul Rahman Rahim, SE,MM. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, Sos, M. S.Si selaku Dekan Fisipol Unismuh Makassar. yang telah banyak memberikan masukan, saran, petunjuk, dan motivasi.
5. Bapak. A.Luhur Prianto, S.IP,M.Si selauku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis menimba ilmu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Dinas kelautan kabupaten pangkep dan selurau jajaran yang telah mengeluarkan waktunya memberaikan informasi dan data selama penelitian.
8. Bapak dan ibu Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar yang member dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi

9. Buat kakanda dan adinda Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Unismuh Makassar telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.
10. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtuaku tercinta terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan Do'a serta bantuan dan dorongan dari kalian, Untuk itu, dengan ketulusan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahandaku ALADING dan Ibundaku ST. Aisya yang telah mendidik saya sampai saya seperti sekarang ini dan tak pernah lelah, letih memberikan doa, kasih sayangnya Perhatian dan bimbinganya serta dedikasih yang tak ternilai harganya selama ini dan tak akan pernah mampu ku balas dengan pengorbanan apapun.
11. Kakanda Fitria dan Darma Wati yang kusangi dan kubanggakan selalu menemani penulis, memberi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya kepada penulis.
12. Takwin yang selalu mengingatkan penulis, membantu, memberi motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Bapak Zulkarnain (Om Zulkarnain) yang banyak membantu penulis, ikhlas meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan mendampingi penulis pada masa penelitian semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal Amin.
14. Saudara- Saudariku seangkatan dan seperjuangan angkatan 2011 Serta kakanda senior yang tak bisa ku sebutkan satu persatu terimah kasih atas segala dukungan dan kenangan indah yang selama perkuliahan. berbagi

keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama perkuliahan, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"

15. Keluarga besar kalukuang dan seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih semuanya yang telah menemani hari-hariku

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan mendapat Ridho Allah SWT, Amiin.

WassalamuAlaikum Warahmatullahi WaBarakatuh.

Makassar 11 Agustus 2018

penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman pernyataan keaslian ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata pengantar	v
Daftar isi	viii
Daftar tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Inovasi	8
B. Ciri-Ciri Inovasi.	10
C. Dimensi dan Faktor-Faktor dalam Inovasi	
12	
D. Pemerintahan Daerah.....	15
E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	19
F. Upaya Pemerintah dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	22
G. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Penelitian	32
C. Sumber Data.	33
D. Informan Penelitian.	34
E. Teknik Pengumpulan Data.	34
F. Teknik Analisis Data.	35
G. Pembahasan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Inovasi Motorisasi dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pada Pasal 1 butir 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Melalui asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada daerah tentu tidak terlepas dari inovasi pemerintahan di daerah yang telah diberikan amanat untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan perlu mendapatkan respon yang positif antara tiap komponen yang ada dalam suatu daerah termasuk didalamnya pihak swasta dan masyarakat.

Untuk itulah pemerintah daerah harus mampu membangun hubungan yang selaras dan harmonis dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* agar hubungan yang dimaksud dapat selaras dan harmonis, pemerintah perlu melakukan reposisi sebagai

motivator, dinamisator dan inisiator, sehingga kewenangan yang dimiliki mampu menghantarkan masyarakat pada perikehidupan yang layak, makmur dan sejahtera. Di sinilah diperlukan adanya daya inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Daya inovasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kreatifitas sebagai upaya dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang tersedia secara optimal dan/atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Hutauruk, 2010).

Persoalan yang sering dihadapi pemerintah terkait pengelolaan sumberdaya alam dikemukakan dalam (bappenas.go.id, 2016) yaitu keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan data dan informasi yang akurat berpengaruh pada kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan juga belum melembaga dengan baik sehingga masyarakat belum mendapat akses terhadap data dan informasi secara memadai. Selanjutnya, permasalahan pokok lainnya adalah kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Kondisi ini ditandai dengan maraknya pengambilan terumbu karang dan pemboman ikan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta pertambangan tanpa izin.

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah yang telah dibekali dengan sejumlah keuntungan sebagaimana dikemukakan Keraf dalam

(Jauchar, 2012), menyatakan bahwa secara konseptual otonomi daerah akan lebih menguntungkan bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam akan lebih mengakomodasi kenyataan di lapangan. Melalui otonomi daerah, kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat akan lebih bisa diperhatikan dan diakomodasi. Asumsinya, para pengambil keputusan dan kebijakan publik adalah orang-orang yang mengenal masyarakatnya sehingga kepentingan mereka lebih bisa diperhatikan dan diakomodasi. selanjutnya nasib setiap daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri. Maka masa depan daerah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam kaitan dengan itu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting yang patut dipertimbangkan secara serius dalam setiap perencanaan yang dilakukakan di Daerah.

Termasuk dalam hal ini perencanaan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir di daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemamfaat Sumber Daya Alam khusus hasil laut. Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak dapat dilakukan secara sendiri akan tetapi perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama-sama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan, dengan cara ini diharapkan masyarakat

bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga membantu kelancaran pembangunan dan kemandirian (Mardjoeki, 2012).

Melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan di sebelah utara dan Jawa Timur/Laut Jawa di sebelah barat. Memiliki sejumlah permasalahan hal ini didasarkan melalui pengamatan penulis dilapangan yaitu pendapatan nelayan kurang maksimal hal ini terjadi karena masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya dan hanya mengantungkan mata pencaharian pada hasil tangkap di laut selain itu nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah sementara pemasaran hasil tangkap ikan dilakukan dengan langsung menjual tanpa ada inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tangkap ikan nelayan. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk menggali upaya dan program pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas yang berfokus pada inovasi dari setiap upaya pemerintah daerah tersebut dalam mensejahterakan masyarakat pesisir di Pulau Liukang Kalmas ini.

Program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Liukang Kalmas yaitu inovasi motorisasi yang berkaitan dengan upaya motorisasi nelayan yang artinya nelayan yang punya kapal, ketinting, dan

sebagainya akan diberikan alat penggerak dan alat tangkap ikan. Program inilah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terkait inovasi pemerintahan daerah telah dilakukan diantaranya (Kurniawan dkk, 2013) yang meneliti tentang Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpm- Mpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk inovasi yang terjadi di UPK Kecamatan Wonosalam yaitu pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan yang merupakan hasil inisiatif dari masyarakat Kecamatan Wonosalam. Inovasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Demak melalui Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten Demak. Kemudian hasil penelitian (Handayani, dkk 2012) tentang Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang menunjukkan penyediaan infrastruktur pendukung inovasi yang sudah cukup lengkap.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu penelitian saat ini lebih memprioritaskan proses inovasi motorisasi yang dilakukan melalui sejumlah indikator Jong & Hartog (2003) yaitu dimensi melihat peluang, mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Disamping itu penelitian ini diarahkan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan yang tentunya perlu mengali lebih dalam mengenai segala program pemerintah Kabupaten Pangkep dalam memaksimalkan

pemberdayaan masyarakat pesisir Kecamatan Liukang Kalmas agar lebih produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki.

Berangkat dari uraian latar belakang dan permasalahan yang diamati peneliti maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengungkapkan inovasi pemerintahan yang sesungguhnya dilakukan pemerintah Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan produktivitas nelayan oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi yaitu : *Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat inovasi motosisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep ?

C, Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis :

Diharapkan penelitian ini, dapat menambah dan memperkaya pengetahuan serta referensi mengenai penelitian terkait dengan inovasi pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah di daerah.

2. Manfaat dari segi praktis :

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Pangkep dalam melihat upaya baru dan gagasan baru yang dapat dilakukan pemerintah daerah , dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman mengenai inovasi pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Inovasi

Inovasi diartikan oleh *Galbraith, Schon, Lukas dan Ferrel* (dalam Prawira dkk, 2014:717) sebagai proses dari penggunaan teknologi baru kedalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan-gagasan yang diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga mungkin saja suatu gagasan telah muncul di masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif bagi konsumen yang baru mengetahuinya.

Menurut Oslo Manual dalam Zuhaili, (2013:58) inovasi memiliki aspek yang luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi. Kemudian menurut Fontana (2011) inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersepsikan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang dan/atau jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. Kemudian inovasi dalam konteks lebih luas bahwa inovasi yang berhasil mengandung arti tidak saja keberhasilan ekonomi melainkan juga keberhasilan sosial. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai besar untuk konsumen, untuk komunitas, dan lingkungan

pada saat yang sama. Hampir sama dengan penjelasan tersebut, inovasi organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif.

Selanjutnya David Albury (dalam Djarmut, 2015) mendefinisikan inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru inovasi tidak berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatannya dan kehadirannya. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra dalam Sutarno (2012:13) bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Lebih lanjut Keeh, et.al (2007) menjelaskan inovasi sangat penting karena terdapat alasan berikut: 1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru. 2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi. 3. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam pemenuhan

kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Oleh karena itu skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen sebagai pelanggan. 4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang bagus dapat semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara kontinyu. 5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik.

Dalam lima tahun terakhir, praktek inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah di Indonesia telah diungkapkan dalam sejumlah literatur. Beberapa daerah yang sering menjadi rujukan sebagai best practices penerapan inovasi antara lain adalah Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Menilik kinerja ketiga daerah tersebut, terbukti inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi pemerintah dalam proses reformasi (Asropi, 2008).

B. Ciri-Ciri Inovasi

Adapun ciri-ciri inovasi menurut (Djamrut, 2015) antara lain :

1. Memiliki kekhasan/khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orsinalitas dan kebaruan.

3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun keg-inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Rogers Rogers dalam Suwarno (2008:17) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak sertamerta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namundemikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Kemungkinan Dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

C. Dimensi dan faktor-faktor dalam inovasi

Aspek penting lainnya dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Mulgan dan Albury dalam (Dhewanto: 2014) menjelaskan: 1. Inovasi inkremental: perbaikan pada sistem yang ada. inovasi yang membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi pada level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur

organisasi dan hubungan keorganisasian. Walau demikian, inovasi inkremental memainkan peran - peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat diterapkan secara terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang(value for money). 2. Inovasi radikal: layanan baru, produk, dan cara pengiriman produk. merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian atau pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan. 3. Inovasi sistematis: skala besar dan perubahan kelembagaan mendasar. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan organisasi. Inovasi jenis ini tentu bersifat lebih mendalam. Karena mencakup struktur sistematis keorganisasian.

Kemudian Jong & Hartog (2003) merinci lebih mendalam mengenai dimensi dalam inovasi dilihat dari darisejumlah proses yaitu:

1. Melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan realitanya. Oleh karenanya, perilaku inovatif dimulai dari ketrampilan melihat peluang.

2. Mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau dipersepsikan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide yang sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini kreativitas sangat diperlukan.
3. Mengkaji ide. Tidak Semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berfikir divergen atau mengerucut mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang realistic yang diterima, sementara ide yang kurang realistic dibuang. Kajian dilakukan terus menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas sukses yang paling besar.
4. Implementasi. Pada tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses yang disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk mencapai tujuan atau berinovasi.

Selain dimensi-dimensi yang digambarkan dalam inovasi juga terdapat faktor Pendorong Inovasi Menurut Clark dalam Prawira dkk (2014:717) menyebutkan faktor pendorong inovasi antara lain sebagai berikut: 1. Political Push 2. *Pressure for economy and improved efficiency – ‘bang for the buck’* 3. *Pressure for improved service quality* e. Faktor Penghambat Inovasi Menurut Albury dalam Suwarno (2008:54) menyebutkan faktor penghambat inovasi di sektor publik antara lain: 1. Keengganan menutup program yang gagal; 2.

Ketergantungan berlebihan terhadap high performer; 3. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi; 4. Tidak ada penghargaan atau insentif; 5. Ketidak mampuan menghadapi resiko dan perubahan; 6. Anggaran jangka pendek dan perencanaan; 7. Tekanan dan hambatan administratif; 8. Budaya risk aversion.

D. Pemerintahan Daerah

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan akan tetapi asal kata pemerintahan sebenarnya berasal dari bahasa inggris *Government* yang berarti pemerintah atau pemerintahan (Rosidin, 2015:1). Sementara itu menurut Rasyid (2013), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Adapun pengertian mengenai pemerintahan daerah yang bersumber dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan adanya urusan Pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dapat ditinjau urusan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana

disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pembangunan masyarakat di kemukakan Tampubolon, (2015:153) mempunyai visi pemberdayaan (Empowerment) manusia dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Keswadayaan merupakan sumber daya kehidupan yang abadi dan sebagai modal utama masyarakat untuk mengembangkan dan mempertahankan dirinya di tengah masyarakat lainnya. Pemberdayaan adalah suatu proses dan sekaligus hasil dari proses tersebut. Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar daerah, kelas, ras, jender atau individu. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Dikemukakan Tampubolon, (2015:153) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh adalah untuk lebih memberdayakan usaha masyarakat agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, yaitu dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Di dalam rangka pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan pada masyarakat pesisir melihat sejumlah persoalan masyarakat nelayan diantaranya masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat.
- (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha.
- (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.

- (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
- (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan
- (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi 2009).

Lebih lanjut (Kusnadi 2009) mengemukakan bahwa sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebgaaian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan. Berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciryang dikemukakan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

- (1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam,

- (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi),
- (3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas,
- (4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan
- (5) berkelanjutan, yaitu keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial. (Sipahelut, 2010).

F. Upaya pemerintah dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir

Dikemukakan dalam Razali, (2004:65) Pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) yang telah dilakukan negara belum sepenuhnya mampu melindungi laut dan perikanan (pesisir) dari eksploitasi manusia, baik itu dari pengusaha maupun dari masyarakat sendiri. Bersamaan dengan itu, partisipasi masyarakat belum secara penuh terlibat dalam pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Dengan perkataan lain, pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) dengan perspektif produksi, efisiensi, sosial, ekonomi dan lingkungan harus menjadi komitmen dan tujuan dari pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Artinya pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan (pesisir) yang secara turun temurun dan berkelanjutan telah dipraktekkan dan dikembangkan oleh masyarakat laut dan pesisir harus digunakan untuk kesejahteraan mereka. Namun konsep sistem laut

dan perikanan (pesisir) kerakyatan pemerintah di atas, mengabaikan sejarah (ahistoris). Karena mengabaikan secara hukum keberadaan dan keterampilan rakyat/ penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar laut dan perikanan (pesisir). Posisi rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah dan pengusaha sangat lemah. Karena pelestarian laut dan perikanan (pesisir) (manfaat ekologis) hanya dimungkinkan bila rakyat dilibatkan secara maksimal sehingga tingkat kesejahteraan mereka semakin baik (manfaat ekonomi). Banyak manfaat yang diperoleh dengan pola pengembangan *Community Based Fishing System Management*, antara lain:

1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability).
2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (*equity and social justice*).
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (*self reliance*).

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan

melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat dalam (Syarief, 2009) diantaranya:

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
3. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai

buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan (syarief, 2009), yaitu:

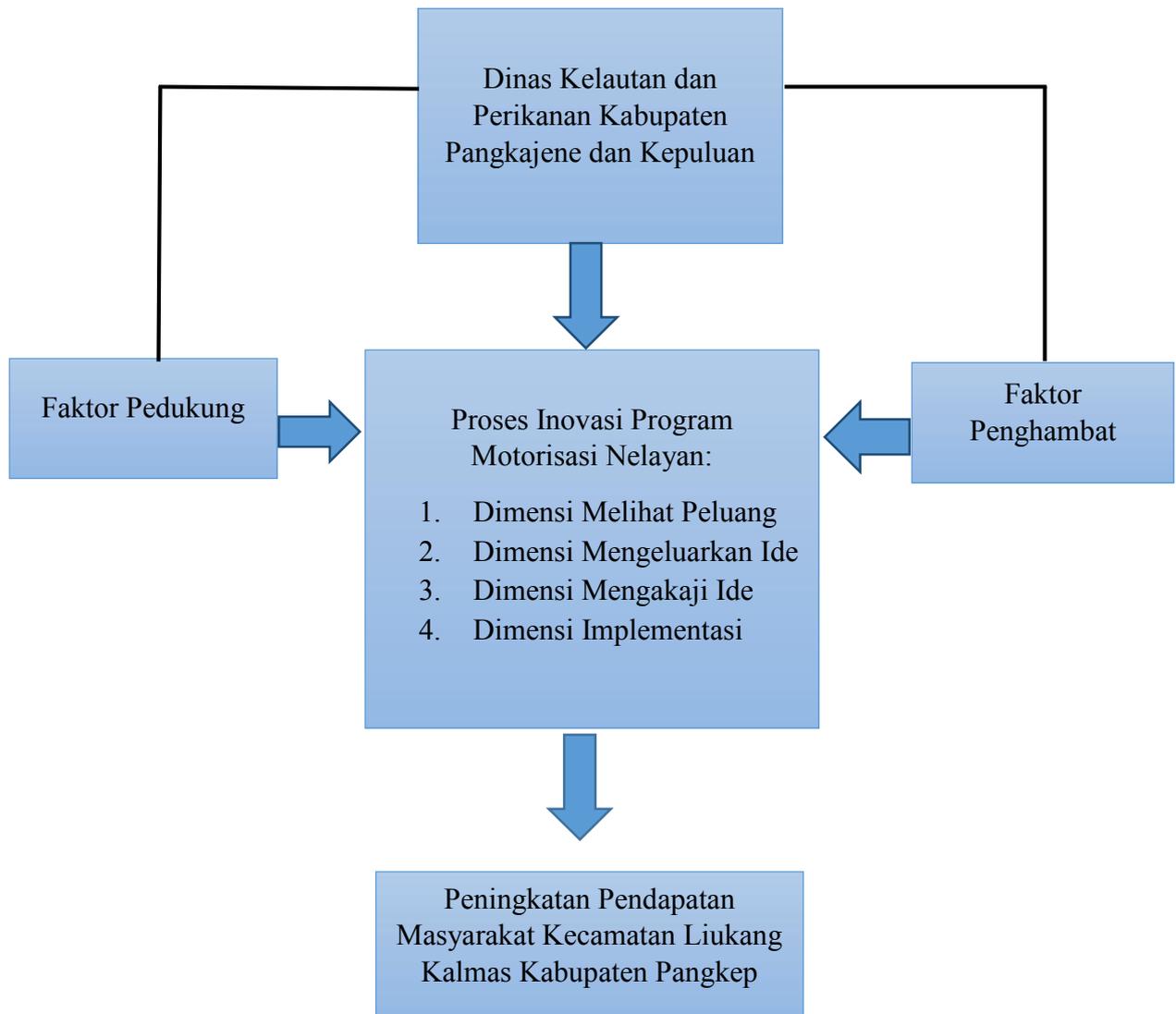
1. Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
2. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.
3. Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

G. Kerangka Pikir

Inovasi organisasi diartikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif Sutarno (2012). Inovasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah melalui program inovasi motorisasi (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas dengan menelusuri sejumlah kegiatan maupun program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu penelitian inovasi pemerintahan ini akan ditelusuri dengan menggunakan sejumlah indikator proses inovasi yang dikemukakan Jong & Hartog (2003) yang mengacu pada dimensi melihat peluang, mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi.

Disamping itu penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan yang tentunya perlu mengali lebih dalam mengenai segala program pemerintah Kabupaten Pangkep dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Kecamatan Liukang Kalmas agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam pemamfaatan sumber daya yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas. Untuk lebih jelasnya mengenai bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

H. Dekripsi Fokus Penelitian

Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Oleh karena itu

untuk melihat inovasi pemerintahan harus tertuju pada kegiatan atau program yang memiliki unsur gagasan baru yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pangkep dalam memaksimalkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas. Inovasi ini dapat ditelusuri melalui proses inovasi yang dilakukan meliputi : (1) Melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan realitanya. Oleh karenanya, perilaku inovatif dimulai dari ketrampilan melihat peluang. (2) Mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau dipersepsikan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide yang sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini kreativitas sangat diperlukan. (3) Mengkaji ide. Tidak Semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berfikir divergen atau mengerucut mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang *realistic* yang diterima, sementara ide yang kurang *realistic* dibuang. Kajian dilakukan terus menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas sukses yang paling besar. (4) Implementasi. Pada tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses yang disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk mencapai tujuan atau berinovasi. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan pendorong yang muncul dalam implementasi inovasi yang dilakukan.

I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku, dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Inovasi Pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, maka dapat dilihat dari indikator berikut :
 - Melihat Peluang yaitu penelusuran mengenai potensi yang menjadi peluang diterapkannya inovasi motorisasi di Kecamatan Liukang Kalmas.
 - Mengeluarkan ide, pada dimensi ini dijelaskan mengenai ide yang digagas untuk melakukan motorisasi perahu nelayan guna meningkatkan pendapatan nelayan. Mengkaji ide yaitu seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide mengenai motorisasi nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.
 - Implementasi, yang ditekankan yaitu pelaksanaan inovasi motorisasi secara berkelanjutan dan outputnya dirasakan oleh masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya inovasi motorisasi nelayan kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasi inovasi motorisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bulan November sampai Desember 2016. Lokasi penelitian dilakukan Pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep selain itu peneliti terjun langsung di Lokasi Nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan *aksesibilitas*, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, dan memberikan peluang yang cukup karena tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas yang diteliti masih terjadi (berlangsung).

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6). Penggunaan metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan tentang inovasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Hal ini dapat dilihat pada penelitian ini yang berfokus pada satu variabel yaitu inovasi pemerintahan.

C. Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film. Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

a. Data primer

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pengolahan dan hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.	1
2.	Kasi Bidang Sarana dan Prasarana perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.	1
3.	Masyarakat Nelayan Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep	5
Total Informan		7

E. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang

diteliti. Jenis *filed research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan di Kecamatan Liukang Kalmas.

- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian baik di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep serta masyarakat nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.
- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2012:334).

1. Data Reduction (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Moleong (2012:330) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi terbagi tiga yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu di uji kekuatan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Liukang Kalmas atau Kalukuang Masalima adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini mencakup wilayah 18 pulau yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan di sebelah utara dan Jawa Timur/Laut Jawa di sebelah barat. Ibukota kecamatan Liukang Kalmas berada di Pulau Kalukuang, yang terletak sekitar 208 km di barat daya Kota Pangkajene. Ibukota Kabupaten Pangkep.

Pulau yang terjauh adalah Pammantauan dan Massalima (Pammas) yang berjarak 85 km dari ibukota kecamatan dan 293 km dari sebelah barat ibukota Kabupaten Pangkep. Luas wilayah kecamatan Liukang Kalmas 91,50 Km² dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalimantan Selatan
- Sebelah Timur : Liukang Tupabiring
- Sebelah Selatan : Liukang Tangaya
- Sebelah Barat : Kepulauan Jawa Timur

Kecamatan ini memiliki TujuhDesa/kelurahan yaitu Pulau Doang-Doangan, Pulau Dewakang, Pulau Marasende, Pulau Kanyurang, Pulau Kalukuang, Pulau Sabaru, dan Pulau Pammas. Desa/kelurahan terluas yaitu Kelurahan Pulau Kalukuang, dengan luas 23,4 km².

1. Kependudukan

Kecamatan Liukang Kalmas saat ini menduduki urutan ke sebelas jumlah Penduduk terbesar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2014 penduduknya mencapai 13.529 jiwa hasil registrasi desa/kelurahan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.619 dan 6.990 orang perempuan sehingga didapatkan sex ratio sebesar 96, berarti dalam setiap 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki.

Jumlah penduduk Kecamatan Liukang Kalmas sebanyak 13.529 orang yang terdiri dari 6.619 orang laki-laki dan 6.990 orang perempuan dengan sex rasio sebesar 96, dan kepadatan penduduk sebesar 148 jiwa/Km². Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Pammas (278 jiwa/Km²) dan yang terkecil penduduknya adalah Desa P. Doangdoangan (68 jiwa/Km²).

Selanjutnya untuk melihat keadaan Lingkungan, Dusun, RW/RK/RT Dan Pamong Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.
Banyaknya Lingkungan, Dusun, RW/RK/RT Dan Pamong Desa Tiap
Desa/Kelurahan di Kecamatan Liukang Kalmas

Desa/Kelurahan.	Lingkungan	Dusun	RW	RT	Pamong Desa
Pulau Doang Doangan	-	2	2	6	3
Pulau Dewakang	-	3	3	7	3
Pulau Marasende	-	2	4	6	2
Pulau Kanyurang	-	4	8	13	7
Pulau Kalu Kalukuang	2	-	4	20	4
Pulau Sabaru	-	2	4	8	4
Pulau Pammas	-	3	5	11	6
Jumlah	2	16	30	71	29

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Liukang Kalmas terdapat 1 Kelurahan, 6 buah Desa, 2 Lingkungan, 16 Dusun, 30 RW, 71 RT serta 29 pamong desa. kemudian kepadatan penduduk dapat disajikan pada tabel berikut ini. Desa/Kelurahan yang memiliki RT terbanyak adalah Kelurahan Pulau Kalu-Kalukuang dengan jumlah RT sebanyak 20 RT, sedangkan Desa/Kelurahan yang memiliki RK/RW terbanyak adalah Desa Pulau Kanyurang yaitu 8 RK.

Tabel 3.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Liukang Kalmas

Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan Per Km2
Pulau Doang doangan	206	745	10,90	68
Pulau Dewakang	494	1.988	10,90	182
Pulau Marasende	259	997	12,40	80
Pulau Kanyurang	535	2.496	10,90	229
Pulau Kalu kalukuang	650	2.692	23,40	115
Pulau Sabaru	345	1.387	11,40	122
Pulau Pammas	757	3.224	11,60	278
Jumlah	3.246	13.529	91,50	148

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk sebesar 148 jiwa/Km² dari 3.246 Rumah tangga. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Pammas (278 jiwa/Km²) dan yang terkecil penduduknya adalah Desa P. Doangdoangan (68 jiwa/Km²).

2. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas dapat dilihat berdasarkan banyaknya Sekolah PAUD Kelas, Murid, Dan Guru Tiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.
Sekolah PAUD menurut Kelas, Murid, Dan Guru Tiap Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
Pulau Doang doangan	1	2	44	4
Pulau Dewakang	2	4	102	10
Pulau Marasende	1	1	62	3
Pulau Kanyurang	1	2	42	3
Pulau Kalu kalukuang	2	4	82	7
Pulau Sabaru	-	-	-	-
Pulau Pammas	-	-	-	-
	7	13	332	27

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 sekolah PAUD dengan jumlah kelas 13 unit dengan 332 jumlah siswa yang jumlah guru secara keseluruhan 27 orang.

Tabel 5.
Jumlah Sekolah TK, SD, SLTP, dan SMA

Desa/Kelurahan	TK/ MDA	SD/MI	SLTP/ MTs	SLTA/ MA	Jumlah
Pulau Doang doangan	-	1	1	-	2
Pulau Dewakang	-	3	2	-	5
Pulau Marasende	1	1	1	1	4
Pulau Kanyurang	-	4	3	-	7
Pulau Kalu kalukuang	2	4	1	1	8
Pulau Sabaru	-	2	2	-	4
Pulau Pammas	3	4	3	1	12
Jumlah	6	19	13	3	41

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 6 TK yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas, dengan jumlah SD sejumlah 19 unit, SMP sejumlah 13, SMA sejumlah 3 unit sekolah dengan total jumlah 41 unit sekolah.

Masih terdapat desa yang belum memiliki infrastruktur Pendidikan Taman Kanak-Kanak. (TK/RA) yakni Pulau DoangDoangan,Pulau Dewakang,Pulau Kanyurang dan Pulau Sabaru. Untuk sarana Menengah Pertama semua Desa/Kelurahan telah memiliki Sekolah tersebut. Kemudian untuk bangunan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sudah 3 Desa/ kelurahan yaitu Desa Marasende, Kelurahan Kalu-Kalukuang dan Desa Pammas.sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada. Pada jenjang pendidikan TK/RA jumlah murid 231

dan 14 orang guru, sedangkan Sekolah Dasar jumlah muridnya adalah sebanyak 2.190 dari 161 orang guru. SLTP berjumlah 715 siswa dari 98 guru, Sedangkan SLTA memiliki 342 orang siswa dengan jumlah guru 40 orang. Ini berarti seorang guru mengajar rata-rata sebanyak 16 murid untuk TK, sebanyak 14 murid untuk tingkat SD, sebanyak 7 siswa untuk tingkat SLTP dan sebanyak 8 siswa untuk tingkat SLTA sederajat. Daya tampung kelas terhadap banyaknya murid haruslah seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak murid dalam satu kelas berimplikasi pada kurangnya atau menurunnya daya serap Murid/Siswa terhadap materi yang diajarkan.

3. Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.
Banyaknya Sarana Kesehatan Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Liukang Kalmas

Desa/Kelurahan	RS	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Fasilitas Kes. Lain
Pulau Doang doangan	-	-	1	2	-
Pulau Dewakang	-	-	1	3	1
Pulau Marasende	-	1	1	1	-
Pulau Kanyurang	-	-	1	4	2
Pulau Kalu kalukuang	-	1	-	3	-
Pulau Sabaru	-	-	-	2	1
Pulau Pammas	-	1	-	2	2
Jumlah	-	2	4	17	7

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Pada tabel di atas dapat diketahui sejumlah sarana kesehatan yang terdiri dari Puskesmas 2 buah, Pustu 4 buah, Posyandu 17 buah dan Fasilitas Kesehatan lainnya 7 buah.

Puskesmas terdapat di Pulau Kalu-Kalukuang yang merupakan ibukota kecamatan dan di pulau bagian barat yang merupakan batas dari Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan dengan Kalimantan. Pustu terdapat di Pulau Doang-Doangan, Pulau Dewakang, Pulau Marasende, dan Pulau Kanyurang sedangkan Poskesdes/Polindes terdapat di Pulau Dewakang, Marasende, Kanyurang, Sabaru dan Pulau Pammas. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, di antaranya dokter umum 4(PTT) dan dokter gigi 2 orang, perawat dan bidan 26 orang dan tenaga

non medis lainnya serta dukun sebanyak 20 orang. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang murah, mudah, dan merata. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membiayai sendiri kebutuhan pencegahan dan pengobatan penyakit yang mungkin diderita yang tidak kalah pentingnya adalah pencapaian program keluarga berencana. yaitu kesejahteraan penduduk yang merata utamanya di daerah kepulauan.

4. Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan

Pengangguran terbuka dan pemanfaatan kurang karena jumlah jam kerja yang rendah mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (labor supply) dan permintaan akan tenaga kerja (labor demand). Perbandingan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha atau bidang pekerjaan di sektor perikanan mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 73 persen tahun 2015, disusul sektor perdagangan, komunikasi, jasa-jasa, listrik, dan bangunan 16 %. Sementara transportasi sebesar 11%.

Saat ini semakin banyaknya keluarga menikmati listrik utamanya listrik non PLN. Tercatat ada 3.168 pengguna atau 95,05% listrik non PLN sisa 78 keluarga atau 3,65% yang belum menikmati listrik non PLN. Artinya hanya 3,65% keluarga di kepulauan masih menggunakan listrik tata surya, generator, dan aki/accu. Khusus daerah kepulauan pengguna listrik non PLN masih sangat terbatas penggunaannya itu dilihat dari waktu pukul 18.00 sampai 21.30. artinya kebutuhan listrik masih sangat minim waktu penggunaannya sehingga masih

sangat membutuhkan perhatian pemerintah dalam pendistribusian solar dengan harga subsidi sehingga masyarakat kepulauan dapat mengurangi beban hidup sehari-hari khususnya bagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap.

Di Kecamatan Liukang Kalmas terdapat Pasar, 1 buah toko sebanyak 172 buah, warung 77 buah, kedai 29 buah, dan toko bahan bangunan 4 buah. Adapun sarana ibadah sebagai sarana kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas terdiri dari : Mesjid 22 buah , Langgar/Musollah 15 buah.

5. Transportasi

Semua desa/kelurahan di Kecamatan Liukang Kalmas menggunakan prasarana transportasi laut. Adapun desa dengan jarak terjauh yaitu desa Pulau Pammias menempuh 85 km ke ibukota kecamatan serta 293 km ke ibukota kabupaten sedangkan yang terdekat yaitu Desa Pulau Dewakang dengan jarak tempuh 99 km ke ibukota kecamatan dan 97 km ke ibukota kabupaten.

Angkutan Laut Perikanan yang terdiri dari Kapal Motor sebanyak 96 buah, Kapal Layar Motor 188 buah, Jolloro 294 buah dan Perahu Katinting sebanyak 738 buah. Angkutan darat bermotor berupa sepeda motor sebanyak 1.174 buah dan pick up/pete-pete tidak ada. Sedangkan untuk angkutan darat tak bermotor sebanyak 1.693 yang terdiri dari sepeda 832 buah dan lainnya 861 buah.

6. Komunikasi

Di sektor komunikasi, seiring dengan terus meningkatnya pengguna telepon genggam (HP) namun hanya di ibukota kecamatan yang dapat menggunakan telepon itupun berada di beberapa titik yang mendapatkan signal untuk menggunakan HP tersebut. Tetapi penggunaan telepon satelit dapat digunakan masing-masing desa/kel di Kecamatan Liukang Kalmas, dengan adanya keberadaan telepon satelit sangat membantu masyarakat dalam melakukan hubungan informasi ke ibukota kabupaten dan makassar, ditambah dengan adanya pesawat dimasing-masing desa/kel juga memudahkan melakukan komunikasi dan gratis bila itu dilakukan di kantor Pemda. Di Kecamatan Liukang Kalmas terdapat sarana Komunikasi berupa Telepon Umum 19 buah, TV 1.711 buah, Radio 1.994 buah, dan lainnya 88 buah.

B. Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru Sutarno (2012:13). Inovasi yang ditekankan pada penelitian ini adalah inovasi motorisasi bagi nelayan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas yang pada implementasi dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Untuk memperoleh gambaran yang lebih kompleks maka penelitian ini ditelusuri dengan menggunakan sejumlah indikator proses inovasi yang dikemukakan Jong & Hartog (2003) yang mengacu pada dimensi melihat peluang,

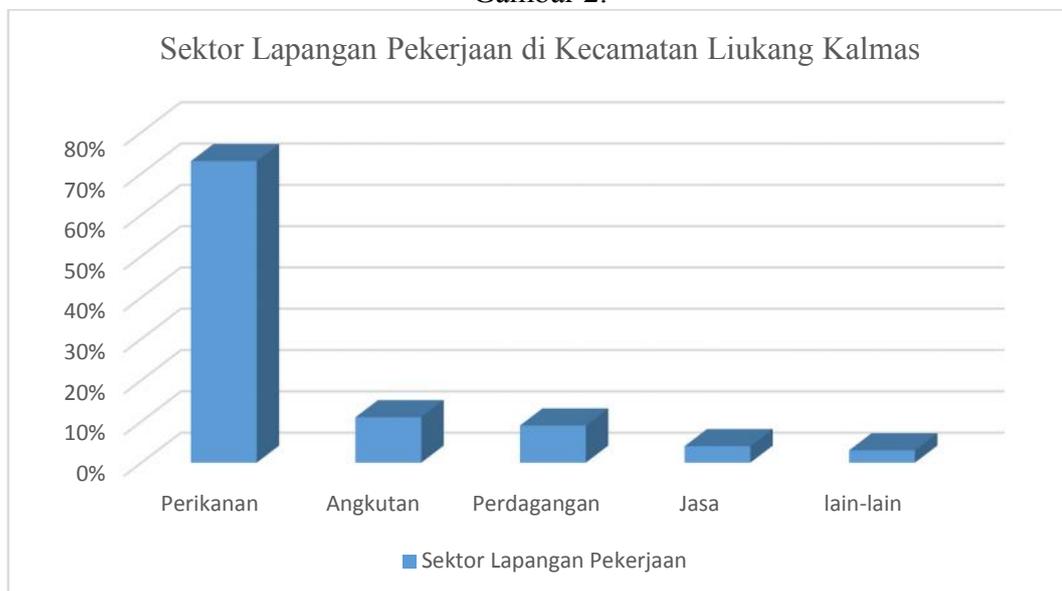
mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melihat Peluang

Pada dimensi ini, dijelaskan mengenai potensi yang menjadi peluang diterapkannya inovasi motorisasi di Kecamatan Liukang Kalmas. Potensi yang dapat dilihat di Kecamatan Liukang Kalmas adalah potensi lautnya. Kecamatan ini memiliki Tujuh Desa/kelurahan yang dikelilingi laut dengan potensi hasil perikanan yang melimpah diantaranya Pulau Doang-Doangan, Pulau Dewakang, Pulau Marasende, Pulau Kanyurang, Pulau Kalu-Kalukuang, Pulau Sabaru, dan Pulau Pammas. Desa/kelurahan terluas yaitu Kelurahan Pulau KaluKalukuang, dengan luas 23,4 km².

Selain potensi wilayah kelautan yang mendukung Kecamatan Liukang Kalmas dalam penerapan inovasi motorisasi yaitu sumberdaya manusia yang bekerja di Kecamatan tersebut lebih mengandalkan sektor perikanan sebagai lapangan pekerjaan produktif hal ini dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 2.



Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Liukang Kalmas, 2016.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Perbandingan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha atau bidang pekerjaan di sektor perikanan mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 73 %, disusul sektor angkutan dengan persentasi 11 %, perdagangan 9 %, komunikasi, jasa-jasa 5 %, dan sektor lainnya sebesar 2 %.

Aspek lain penting untuk diperhatikan adalah peluang usaha potensial yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas yaitu potensi telur ikan terbang yang merupakan hasil ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi hal ini sesuai dengan hasil wawancara ADS selaku nelayan Pulau Kalu-kalukuang di Kecamatan Liukang Kalmas yang mengemukakan bahwa :

“kalau disini ada nelayan yang kelaut secara khusus mencari torani, berlayar ke tengah laut hingga selama berminggu-minggu untuk mengumpulkan telur ikan terbang yang bisa diekpor ikannya”
(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2017)

Kemudian nelayan lain, DA mengemukakan bahwa :

“kalau di galesong ada penhasil ikan torani disini diambil itu ikannya mereka cari sampai kepulau Kalu-Kalukuang karena memang ikan terbang disini bagus kualitas telurnya”
(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peluang pendapatan nelayan yang potensial ada pada pencarian ikan torani di Laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan masyarakat Liukang Kalmas mengandalkan sektor perikanan dengan persentasi 73 % hal ini merupakan peluang yang baik dilakukannya inovasi motorisasi mengingat hal nelayan yang melaut membutuhkan kapal dengan mesin motor untuk mengarungi lautan terutama yang secara khusus mencari ikan torani atau ikan terbang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi kondisi ini tentu dapat meningkatkan pendapatan para nelayan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas.

2. Mengeluarkan ide

Pada dimensi ini dijelaskan mengenai ide yang digagas untuk melakukan motorisasi perahu nelayan guna meningkatkan pendapatan nelayan tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga perikanan yang ada di Setiap Desa atau kelurahan di Liukang Kalmas yang bergantung hidup pada sektor perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 7
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Status Tiap Desa/Kelurahan di
Kecamatan Liukang Kalmas

Desa/Kelurahan.	Pengusaha	Buruh	Jumlah
Pulau Doang- doangan	156	22	178
Pulau Dewakang	438	33	471
Pulau Marasende	212	20	228
Pulau Kanyurang	504	62	566
Pulau Kalu- kalukuang	563	49	612
Pulau Sabaru	277	48	325
Pulau Pammas	682	56	738
JUMLAH	2.832	290	3.122

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3.122 rumah Tangga yang mengantungkan mata pencaharian mereka pada sektor perikanan yang dibagi dalam kategori pengusaha sejumlah 2.832 rumah tangga dan buruh sejumlah 290 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan mereka pada sektor perikanan sangatlah penting, kondisi ini dikemukakan oleh nelayan Pulau Kalu-kalukuang, ADS yang mengatakan bahwa :

“nelayan memerlukan sarana prasarana pendukung untuk dapat memaksimalkan hasil tangkap kami disini perlu perhatian pemerintah terutama sarana kapal yang masih banyak mengandalkan perahu tradisional”

(Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat memerlukan sarana prasarana perikanan yang mampu menunjang aktifitas mereka dalam mencari ikan dengan kata lain pemerintah diharapkan untuk memfasilitasi dalam bentuk sarana prasarana perikanan khususnya sarana penunjang kapal tangkap ikan oleh nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas. Ide atau pun solusi dari permasalahan tersebut dikemukakan oleh informan Kasi Bidang Sarana dan Prasarana perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, yang mengatakan bahwa :

“Inovasi motorisasi ini berlaku bagi kelompok nelayan dengan bentuk pemberian, motor tempel, perahu motor kepada para nelayan agar dapat memaksimalkan hasil tangkap mereka”
(Hasil wawancara tanggal 21 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa inovasi motorisasi merupakan sebuah gagasan yang ditujukan kepada nelayan melalui kelompok nelayan dengan bentuk pemberian motor tempel, perahu motor kepada para nelayan yang ditujukan agar dapat memaksimalkan sumber pendapatan mereka.

3. Mengkaji Ide

Salah satu dasar pertimbangan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide mengenai motorisasi nelayan dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang mengemukakan bahwa :

“Motorisasi perahu penangkap ikan membawa perubahan pola penangkapan ikan yang menyebabkan meningkatnya tingkat pendapatan dan meluasnya jangkauan operasi nelayan, perubahan taraf hidup nelayan tradisional”

(Hasil wawancara tanggal 21 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa motorisasi perahu nelayan dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan nelayan dengan meluasnya jangkauan operasi nelayan tersebut.

Inovasi motorisasi dapat memberikan dampak efektifitas pekerjaan dan hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan kapal tradisional yang tak bermotor hal ini dikemukakan oleh AS salah satu nelayan di Pulau Pammias yang mengemukakan bahwa :

“daerah penangkapan perahu tanpa mesin terbatas pada jarak rata-rata 5 km dari tepi laut. Waktu yang diperlukan biasa satu hari saja kita berangkat subuh hari dan pulang hingga sore hari”

(Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan nelayan lainnya yang menggunakan perahu tanpa motor di Pulau Pammias, MS yang mengemukakan bahwa :

“jaraknya untuk melaut terbatas jangkauannya terutama kalau cuaca tidak menentu, hasil tangkapan ikan juga tentu sedikit kalau mau dibandingkan dengan kapal yang bermesin”

(Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penggunaan kapal tanpa mesin motor memiliki keterbatasan jangkauan operasi tangkapan ikan dan waktu yang terbatas untuk melaut karena hanya berlangsung satu hari hal ini yang membedakan dengan kapal yang dilengkapi dengan motor penggerak karena dapat menempuh jarak operasi yang lebih jauh yang tentunya jumlah menghasilkan jumlah tangkapan yang berbeda.

4. Implementasi

Pada dimensi implementasi yang ditekankan yaitu pelaksanaan inovasi motorisasi secara berkelanjutan dan outputnya dirasakan oleh masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

Untuk mengetahui pelaksanaan inovasi ini maka dapat diketahui terlebih dahulu jumlah kapal yang telah dimotorisasi dan yang belum memiliki mesin motor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Pembagian Kapal yang bermesin/motor dan tidak bermesin/motor

Desa/Kelurahan.	Kapal Motor	Kapal Tempel	Perahu tak bermotor
Pulau Doang- doangan	13	90	26
Pulau Dewakang	8	16	68
Pulau Marasende	22	70	33
Pulau Kanyurang	38	97	40
Pulau Kalu- kalukuang	10	132	28
Pulau Sabaru	0	90	34
Pulau Pammas	5	243	76
Jumlah	96	738	305

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Liukang Kalmas, 2016.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 738 kapal tempel, 96 kapal motor dan terdapat 305 perahu tanpa menggunakan motor. Untuk

memperoleh gambaran mengenai pentingnya inovasi motorisasi bagi perahu atau kapal nelayan yang belum memiliki motor maka dilakukan wawancara dengan informan AS selaku nelayan di Pulau Pammas yang mengemukakan bahwa :

“penggunaan perahu tanpa motor terbatas kita pergi hanya yang dekat dari tepi biasanya mengayuh perahunya sampai dua kilometeran dari bibir pantai. Tangkapannya tidak banyak, paling banyak 5 sampai 10 kilo ikan atau cumi”

(Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan nelayan Pulau Kalu-Kalukuang MH mengemukakan bahwa :

“penggunaan kapal tanpa motor hasil tangkapan ikannya tentu sedikit biasa untuk keperluan sendiri walaupun dalam jumlah banyak itu akan dijual ikannya untuk pendapatan nelayan”

(Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penggunaan perahu atau kapal tanpa motor memiliki keterbatasan hasil tangkapan karena jarak operasi tangkap yang dekat antara 1 sampai 2 Kilometer dengan hasil tangkapan yang minim yang dalam jumlah sedikit dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan apabila dalam jumlah banyak dapat dijual untuk tambahan pendapatan.

Sementara untuk perahu atau kapal bermotor dapat meningkatkan pendapatan nelayan hal ini dapat ditelusuri dari hasil wawancara dengan informan MS yang mengemukakan bahwa :

“ Hasil tangkapan itu sangat berbeda dengan yang didapat nelayan yang menggunakan perahu ukuran besar di sana. Pada umumnya, kapal bermesin dan berukuran besar bisa mencari ikan di perairan yang jaraknya lebih dari 10 kilometer dari pantai, dengan hasil tangkapan hingga sampai ratusan Kilo ikan”

(Hasil wawancara tanggal 15 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui jelas perbedaan hasil tangkapan ikan yang dilakukan dengan perahu tanpa motor dengan yang memiliki

motor secara kuantitas lebih besar jumlah ikan yang didapatkan karena jarak operasi tangkapan yang jauh sehingga jumlah tangkapan ikan juga dapat dimaksimalkan hingga ratusan kilo jumlahnya.

Untuk mengetahui pendapatan nelayan yang menggunakan mesin/motor dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan informan DA selaku nelayan mengemukakan bahwa :

“kalau pendapatannya bisa dapat sampai 5 juta, nelayan biasanya beranggotakan 3-4 orang dalam satu perahu dan perahu yang digunakan adalah perahu jenis jolloro’/perahu bermotor yang ukurannya lebih kecil dari perahu yang umum di gunakan. Lama waktu melaut biasanya sekitar 1-5 hari tergantung banyaknya ikan”
(Hasil wawancara tanggal 15 Maret 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan informan AS yang mengemukakan bahwa :

“pendapatan nelayan sendiri terbagi-bagi setelah dibagi oleh punggawa satu kali res (satu kali sandar) biasa kita dapat 4 sampai 5 juta jadi kalau dibagi untuk anak buah seperti saya bisa dapat 500.000 untuk satu orang”
(Hasil wawancara tanggal 15 Maret 2017)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Pengolahan dan hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang mengemukakan bahwa :

“Kalau pendapatan sendiri nelayan ikan toroni lebih besar pendapatannya pastinya menggunakan perahu yang punya mesin, omzet perdagangan telur ikan dipulau Kalu kalukuang ini mencapai miliaran rupiah pertahunnya. Harga per kilogram telur ikan terbang tersebut mencapai ratusan ribu rupiah”
(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan ADS selaku ketua kelompok nelayan Pulau Kalu- kalukuang yang mengemukakan bahwa :

“patorani (nelayan ikan torani) bisa kita berlayar sampai belasan mil ke arah selatan dari pulau, itu kita sudah dapat puluhan hingga ratusan kilogram torani segar, dalam sekali berlayar, pendapatannya itu bisa dapat 12 juta satu kali res (satu kali sandar)”
(Hasil wawancara tanggal 19 Maret 2017)

Berdasarkan sejumlah hasil wawancara di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antara pendapatan nelayan yang tidak menggunakan motor pada perahu dengan nelayan yang telah menggunakan teknologi motorisasi melalui inovasi motorisasi pendapatan nelayan jauh lebih meningkat tidak hanya untuk kebutuhan keluarga tetapi dapat memberikan pendapatan bagi para nelayan yang jumlah pendapatannya dapat mencapai 5 juta untuk tangkapan ikan biasa sementara untuk ikan torani pendapatannya bisa mencapai 12 juta satu res (satu kali sandar).

Secara keseluruhan dari sejumlah dimensi yang digambarkan terkait Inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa pada dimensi melihat peluang, sumber pendapatan masyarakat Liukang Kalmas mengandalkan sektor perikanan dengan persentasi 73 % hal ini merupakan peluang yang baik untuk dilakukannya inovasi motorisasi mengingat bahwa nelayan yang melaut membutuhkan kapal dengan mesin motor untuk mengarungi lautan terutama yang secara khusus mencari ikan torani atau ikan terbang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi kondisi ini tentu dapat meningkatkan pendapatan para nelayan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas.

Kemudian pada dimensi mengeluarkan ide, dapat diperoleh penjelasan bahwa ide yang digagas untuk melakukan motorisasi perahu nelayan guna

meningkatkan pendapatan nelayan tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga perikanan yang ada di Setiap Desa atau kelurahan di Liukang Kalmas yang mengantungkan hidup pada sektor perikanan. Inovasi motorisasi ini merupakan sebuah gagasan yang ditujukan kepada nelayan melalui kelompok nelayan dengan bentuk pemberian motor tempel, perahu motor kepada para nelayan yang ditujukan agar dapat memaksimalkan sumber pendapatan mereka.

Pada dimensi mengkaji ide, dapat diperoleh penjelasan bahwa penggunaan kapal tanpa mesin motor memiliki keterbatasan jangkauan operasi tangkapan ikan dan waktu yang terbatas untuk melaut karena hanya berlangsung satu hari hal ini yang membedakan dengan kapal yang dilengkapi dengan motor penggerak karena dapat menempuh jarak operasi yang lebih jauh yang tentunya menghasilkan jumlah tangkapan yang berbeda hal inilah yang menyebabkan inovasi motorisasi ini penting bagi peningkatan pendapatan nelayan.

Selanjutnya pada dimensi implementasi dapat diperoleh penjelasan bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antara pendapatan nelayan yang tidak menggunakan motor pada perahu dengan nelayan yang telah menggunakan teknologi motorisasi melalui inovasi motorisasi pendapatan nelayan jauh lebih meningkat tidak hanya untuk kebutuhan keluarga tetapi dapat memberikan pendapatan bagi para nelayan yang jumlah pendapatannya dapat mencapai 5 juta untuk tangkapan ikan biasa sementara untuk ikan torani pendapatannya bisa mencapai 12 juta satu res (satu kali sandar). Seluruh penjelasan dari dimensi tersebut menunjukkan bahwa inovasi motorisasi memiliki dampak

yang besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya inovasi motorisasi nelayan kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasi inovasi motorisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.

Tabel. 8

Jumlah bantuan motorisasi setiap nelayan.

No	Nama	Rw	Mesin	Jumlah
1	Samsuddin	Rw. 1	16 pk	1
2	Mulianto	Rw. 1	16 pk	1
3	Muhammad Rijal	Rw. 1	16 pk	1
4	Riswanto	Rw. 1	16 pk	1
1	Abd. Rajab	Rw. 11	24 pk	1
2	Idrus	Rw. 11	24 pk	1
3	Jawahir	Rw. 11	24 pk	1
4	Mahayuddin	Rw. 11	16 pk	1
1	Haris	Rw. 111	16 pk	1
2	Suhaer	Rw. 111	16 pk	1
3	Jasman	Rw. 111	16 pk	1
1	Ridwan	Rw. 1V	16 pk	1
2	Zulham Sinatupan	Rw. 1V	16 pk	1
3	Arifin	Rw. 1V	16 pk	1
Jumlah bantuan nelayan				14

1. Faktor Pendukung

Untuk mengetahui segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya inovasi motorisasi nelayan kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pendapatan nelayan maka dilakukan penelusuran wawancara dengan informan Kasi Bidang

Sarana dan Prasarana perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang mengemukakan bahwa :

“untuk disini sendiri ada bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang dikategorikan kurang mampu, bantuan ini ada 10 unit mesin untuk masyarakat miskin tidak mampu yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas”

(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat dukungan atau bantuan sarana bagi nelayan yang miskin dan kurang mampu dalam bentuk mesin atau motor kapal hal ini bertujuan agar hasil tangkap nelayan dapat meningkat yang otomatis dapat meningkatkan pula pendapatan nelayan. Hal ini diakui oleh nelayan yang memperoleh bantuan mesin oleh pemerintah mengungkapkan bahwa :

“Iya sebelum ada bantuan mesin pendapatan kami sangat rendah dan biasa juga menyulitkan kami berlayar. Setelah ada bantuan dari pemerintah berupa mesin alhamdulillah kami sangat bersyukur karna kami rasa tdk ada lagi menyulitkan atau pantangan untuk berlayar untuk mencari ikan”

(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah membantu para nelayan dalam melakukan aktifitas berlayar yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan nelayan tersebut.

Selain bantuan dari pemerintah yang menjadi faktor pendukung inovasi motorisasi bagi para nelayan terdapat pula faktor pendukung lainnya yaitu semakin banyak kapal jolloro dan kapal berukuran besar yang membutuhkan mesin motor hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 9
Pembagian Kapal Bermesin berdasarkan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Kapal Motor	Kapal Layar Motor	Jolloro
.Pulau Doang- doangan	13	-	11
Pulau Dewakang	8	14	104
Pulau Marasende	22	1	21
Pulau Kanyurang	38	18	52
Pulau Kalu- kalukuang	10	87	23
Pulau Sabaru	-	12	6
Pulau Pammas	5	56	77
Jumlah	96	188	294

Sumber : Liukang Kalmas dalam angka, 2016.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kapal motor dengan jumlah 96, kapal motor 188 dan jolloro sejumlah 294 jumlah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan perahu dengan motorisasi telah banyak digunakan hanya pada 305 perahu tak bermotor yang belum menggunakan mesin sesuai data tabel. 9. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong perlunya inovasi motorisasi pada kapal yang belum dilengkapi dengan mesin penggerak.

Berdasarkan data sekunder dan data hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung inovasi motorisasi nelayan dalam meningkatkan pendapatan nelayan menunjukkan bahwa terdapat dukungan atau bantuan sarana bagi nelayan yang miskin dan kurang mampu dalam bentuk mesin atau motor kapal hal membantu para nelayan dalam melakukan aktifitas berlayar

yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas. Selain itu semakin banyak penggunaan kapal jolloro dan kapal berukuran besar yang membutuhkan mesin motor mendorong perlunya inovasi motorisasi pada kapal nelayan ditingkatkan.

3. Faktor Penghambat

Untuk melihat faktor penghambat dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasi inovasi motorisasi dalam meningkat pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas maka perlu ditelusuri melalui serangkaian wawancara dengan informan nelayan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas, salah satunya MH nelayan dari Pulau Kalukuang yang mengemukakan bahwa :

“salah satu masalah yaitu pada masa tertentu nelayan tidak melaut karena gelombang besar, angin yang kencang, dan arus laut yang kuat ini bisa dikatakan musim paceklik kita berpikir untuk turun melaut”
(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan informan nelayan lainnya dari Pulau Pammias, mengemukakan bahwa :

“pada musim paceklik biasanya sebagian nelayan ada yang beralih profesi lain untuk menafkahi keluarga seperti bertani dan tukang batu ada juga yang tetap melaut bagi kapal besar walaupun hasil juga tidak maksimal karena ombak besar”
(Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan yaitu kondisi alam yang tidak mendukung meskipun dengan kapal besar yang telah menggunakan mesin/motor kapal tetapi kondisi alam seperti ombak, angin

dan arus laut mempengaruhi perolehan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tentunya tidak maksimal.

Selain faktor kondisi alam, biaya perbaikan mesin dan biaya operasional menjadi faktor penghambat selanjutnya dari inovasi motorisasi ini hal dapat mempengaruhi pendapatan nelayan. Hal ini dikemukakan melalui serangkaian hasil wawancara dengan informan, salah satunya Nelayan Pulau Kalu-kalukuang yang mengemukakan bahwa :

“modal operasional untuk turun melaut, cukup besar. Jika ada perbaikan peralatan seperti mesin dan kelengkapan kapal lainnya apalagi kalau ada kapal yang bocor hal ini tentu menghambat kami melaut kira-kira makan biaya juga sekitar 10 jutaan itu”
(Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan informan MS, Nelayan Pulau Pammas mengemukakan bahwa :

“sebelum turun melaut yang banyak memakan biaya juga diantaranya itu biaya perbaikan (kapal, mesin, dan alat tangkap), dan biaya operasional (solar, air tawar, es, dan oli)”
(Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa salah satu hambatan dalam inovasi motorisasi adalah besarnya biaya operasional dan perbaikan kapal sehingga mengakibatkan pendapatan nelayan harus terpengkas oleh biaya tersebut.

Dari serangkaian penjelasan tentang faktor penghambat inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan yaitu kondisi alam yang tidak mendukung meskipun dengan kapal besar yang telah menggunakan mesin/motor kapal tetapi kondisi alam seperti ombak, angin dan

arus laut mempengaruhi perolehan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tentunya tidak maksimal selain itu faktor penghambat lainnya yaitu biaya perbaikan dan operasional kapal yang mengakibatkan pendapatan nelayan terpengkas.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas yaitu terdapat dukungan atau bantuan sarana bagi nelayan yang miskin dan kurang mampu dalam bentuk mesin atau motor kapal hal membantu para nelayan dalam melakukan aktifitas berlayar yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas. Selain itu semakin banyaknya penggunaan kapal jolloro dan kapal berukuran besar yang membutuhkan mesin motor mendorong perlunya inovasi motorisasi pada kapal nelayan ditingkatkan kedua hal ini merupakan faktor pendukung inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.

Selanjutnya faktor penghambat inovasi motorisasi dalam peningkatan pendapatan nelayan yaitu kondisi alam yang tidak mendukung meskipun dengan kapal besar yang telah menggunakan mesin/motor kapal tetapi kondisi alam seperti ombak, angin dan arus laut mempengaruhi perolehan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tentunya tidak maksimal selain itu faktor penghambat lainnya yaitu biaya perbaikan dan operasional kapal yang mengakibatkan pendapatan nelayan terpengkas. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah

terkait program khusus yang dapat diberikan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi beban biaya operasional para nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang inovasi motorisasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Sumber pendapatan masyarakat Liukang Kalmas mengandalkan sektor perikanan dengan persentasi 73 % hal ini merupakan peluang yang baik untuk dilakukannya inovasi motorisasi mengingat bahwa nelayan yang melaut membutuhkan kapal dengan mesin motor untuk mengarungi lautan terutama yang secara khusus mencari ikan torani atau ikan terbang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, selanjutnya ide yang digagas untuk melakukan motorisasi perahu nelayan guna meningkatkan pendapatan nelayan tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga perikanan yang ada di Setiap Desa, Selain itu kapal yang dilengkapi dengan motor penggerak dapat menempuh jarak operasi yang lebih jauh yang tentunya menghasilkan jumlah tangkapan yang berbeda dengan perahu tanpa motor sehingga ditemukan perbedaan pendapatan yang cukup signifikan, melalui inovasi motorisasi pendapatan nelayan jauh lebih meningkat tidak hanya terbatas untuk kebutuhan keluarga nelayan tetapi dapat memberikan tambahan pendapatan.
- 2 Faktor pendukung yaitu bantuan pemerintah berupa sarana bagi nelayan yang miskin dan kurang mampu dalam bentuk mesin atau motor kapal hal ini membantu para nelayan dalam melakukan aktifitas berlayar yang otomatis

dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas. Selain itu semakin banyaknya penggunaan kapal jolloro dan kapal berukuran besar yang membutuhkan mesin motor mendorong perlunya inovasi motorisasi. Sementara faktor penghambat yaitu kondisi alam yang tidak mendukung meskipun dengan kapal besar yang telah menggunakan mesin/motor kapal tetapi kondisi alam seperti ombak, angin dan arus laut mempengaruhi perolehan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tentunya tidak maksimal selain itu faktor penghambat lainnya yaitu biaya perbaikan dan operasional kapal yang mengakibatkan pendapatan nelayan terpengkas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan perhatian dari pemerintah terkait program khusus yang dapat diberikan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi beban biaya operasional kapal yang dimiliki para nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas.
2. Perlunya pelatihan keterampilan bagi para nelayan untuk memberikan nilai tambah ekonomis melalui pengolahan ikan yang dapat mereka produksi dan pasarkan.
3. Nelayan sebaiknya fokus pada tangkapan ikan torani yang memiliki kualitas bagus jika dibandingkan daerah lain di Indonesia oleh sebab itu untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Kalmas sebaiknya pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana khusus pengelolaan ikan torani yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asropi, 2008. *Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume V, Nomor 3. Hal: 246-255.
- Bappenas. 2016. *Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (BAB IX)*. www.bappenas.go.id. Diakses 12 November 2016.
- Dhewanto, Wawan. 2014. *Manajemen Inovasi; Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Djamrut, Dayang Erawati. 2015. *Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3.
- Fontana, Avanti. 2011. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Cipta Inovasi Sejahtera
- Handayani, Wiwandari; Setyono, Jawoto Sih; Sophianingrum, Mada; Kusharsanto, Satria. 2012. *Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang*. Riptek Volume 6, No.2 Hal : 1 -16.
- Hutauruk, R Thomas. 2010. *Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur*. (Artikel Ilmiah), <http://download.portalgaruda.org>. Diakses tanggal 12 November 2016.
- Jauchar, B. 2012. *Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan Dan Perkebunan)*. Jurnal Borneo Administrator, Volume 8, No. 1.
- Keeh, Hean Tat, Mai Nguyen & Ping. 2007. *The Effects of Entrepreneurial Orientation and Marketing Information on the Performance of SMEs*. Journal of Business Venturing, page: 592-611.
- Kurniawan, Daniel Teguh; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Kushadayani. 2013. *Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpm- Mpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 2.

- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Mardjoeki, 2012. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi* Volume. 1 Nomor 1.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prawira, Maulana Arief; Noor, Irwan; Nurani, Farida. 2014. *Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center Spgdt 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provisini Dki Jakarta)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, No. 4. Hal. 715-721.
- Rasyid, M. Ryaas dkk. 2013. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Razali, Ivan. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut*. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Volume 3, Nomor 2. Halaman 61 – 68.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia,
- Sipahelut, Michel. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. (Tesis) Bogor: IPB.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutarno. 2012. *Serba-serbi Manajemen Bisnis*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LANPress.
- Syarief, Efrizal. 2009. *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. www.bappenas.go.id. Diakses 12 November 2016.
- Tampubolon, Dahlan. 2015. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti*. *Jurnal SOROT* Volume 8 Nomor 2.hlm. 1-190.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Zuhal. 2013. *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

RIWAYAT HIDUP



JUNAID Lahir di pulau Kalukalukuang Kecamatan Liukan Kalmas Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Agustus 1990. Merupakan anak terhir dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Alading dan Ibunda ST. Aisyah. Penulis memulai

pendidikan Dasar pada tahun 1997 di SDN. 18 Kalukalukuang Kabupateng Pangkep Kecamatan Liukan Kalmas dan pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kalukalukuang Kabupaten Pangkep dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan di MA DDI di Kalukalukuang Kabupaten Pangkep dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2011. penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Strata satu (S1).